

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi secara nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan sasaran menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menuju masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Todaro, 2000).

Pembangunan mempunyai berbagai macam arti, proses multidimensi yang mencakup perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional maupun lokal dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.

Pengangguran merupakan istilah bagi penduduk yang memasuki usia kerja namun tidak memiliki pekerjaan. Permasalahan mengenai pengangguran merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap negara. Hal ini selain karena pengangguran berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pengangguran juga menjadi beban ekonomi neegara.

Pengangguran berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Hasyim (2015: 198), pengangguran dapat berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat sehingga akan menurunkan kesejahteraan. Pengeluaran konsumsi orang yang

menganggur akan semakin kecil, sehingga mengganggu tingkat kesehatan keluarganya.

Menurut Sukirno (2012: 332), pengangguran menjadi salah satu sebab tingginya tindakan kejahatan di masyarakat. Orang yang menganggur berarti orang yang tidak memiliki pendapatan, sementara kebutuhan hidupnya tetap harus dipenuhi. Sehingga orang yang menganggur tersebut rentan melakukan kejahatan seperti pencurian dan penipuan.

Selain itu (Sukirno, 2012: 332), pengangguran juga merupakan salah satu sumber/penyebab terjadinya ketidakstabilan politik pada suatu negara. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak puas dengan pihak pemerintah. Seringkali masyarakat yang menganggur akibat pemutusan hubungan kerja atau akibat dari kurang lapangan kerja melakukan demonstrasi pada pemerintah. Hal tersebut akan menghambat investasi serta pengembangan kegiatan ekonomi.

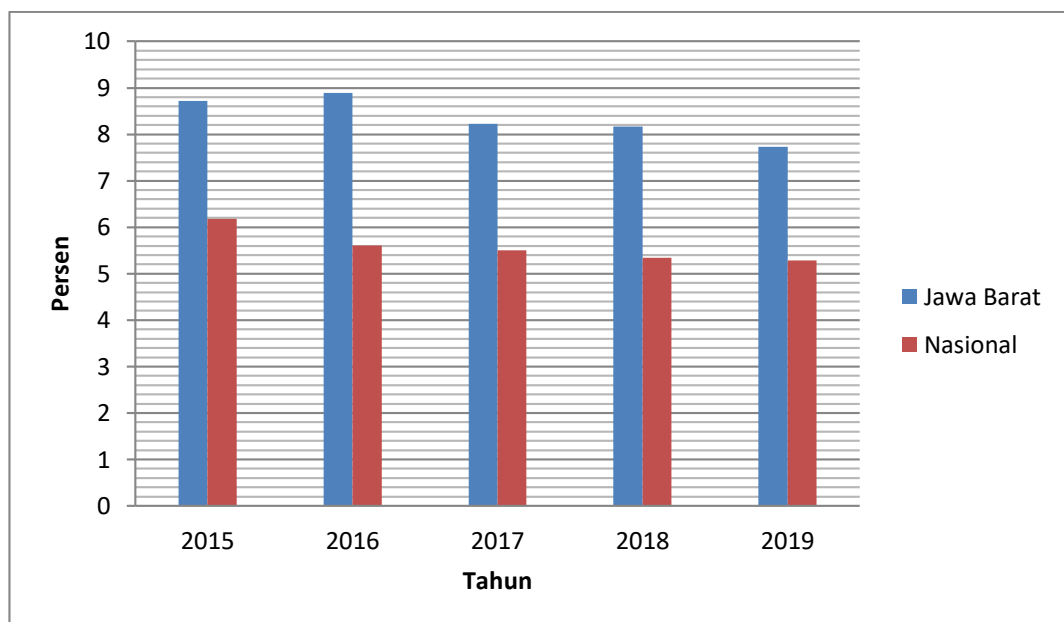
Oleh sebab itu, dari berbagai dampak negatif yang terjadi akibat pengangguran tersebut, salah satu yang selalu menjadi tujuan dalam setiap rencana pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah adalah mengurangi pengangguran.

Setiap negara, khususnya negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, pengangguran merupakan masalah yang serius. Pada masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan yang matang.

Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 7,05 juta jiwa. Pengangguran terbuka adalah mereka yang menganggur dan tidak

memiliki pekerjaan sama sekali. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 5,01 persen. Masalah pengangguran yang terjadi di Indonesia tersebar luas di berbagai provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sangat banyak. Yaitu mencapai 7,73 persen, lebih besar 2,72 persen dari jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat melebihi angka tingkat pengangguran Nasional. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu 8,89 persen. Pada tahun 2019 mencapai 7,73

persen. Angka tersebut masih cukup tinggi dibandingkan dengan angka tingkat pengangguran nasional yaitu 5,28 persen.

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa Barat	8,72%	8,89%	8,22%	8,17%	7,73%
Jawa Timur	4,47%	4,21%	4,00%	3,99%	3,83%
Jawa Tengah	4,99%	4,63%	4,57%	4,51%	4,22%
DIY	4,07%	2,72%	3,02%	3,35%	2,86%
DKI Jakarta	8,36%	5,77%	5,36%	5,34%	5,13%
Banten	9,55%	8,92%	9,28%	8,52%	7,58%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2015-2019

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pada Tahun 2015 sampai Tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi kedua paling tinggi setelah Provinsi Banten. Namun pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat berada di posisi pertama, yaitu mencapai 7,73 persen. Dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang paling rendah ada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Tahun 2019 mencapai 2,86 persen.

Menurut Wahyuni (2005), salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat,

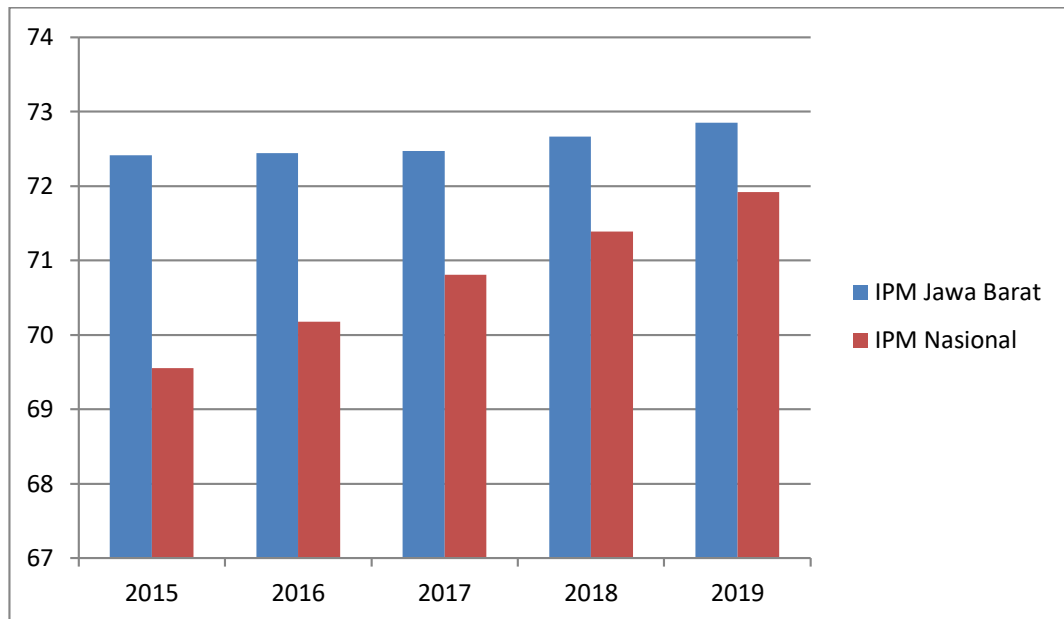
jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama dibidang ketenagakerjaan.

Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui besarnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut Saputra (2011), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan seseorang.

Menurut Napitulu (2007), indeks pembangunan manusia memuat dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas. Sebaliknya, semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas.

Perkembangan besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



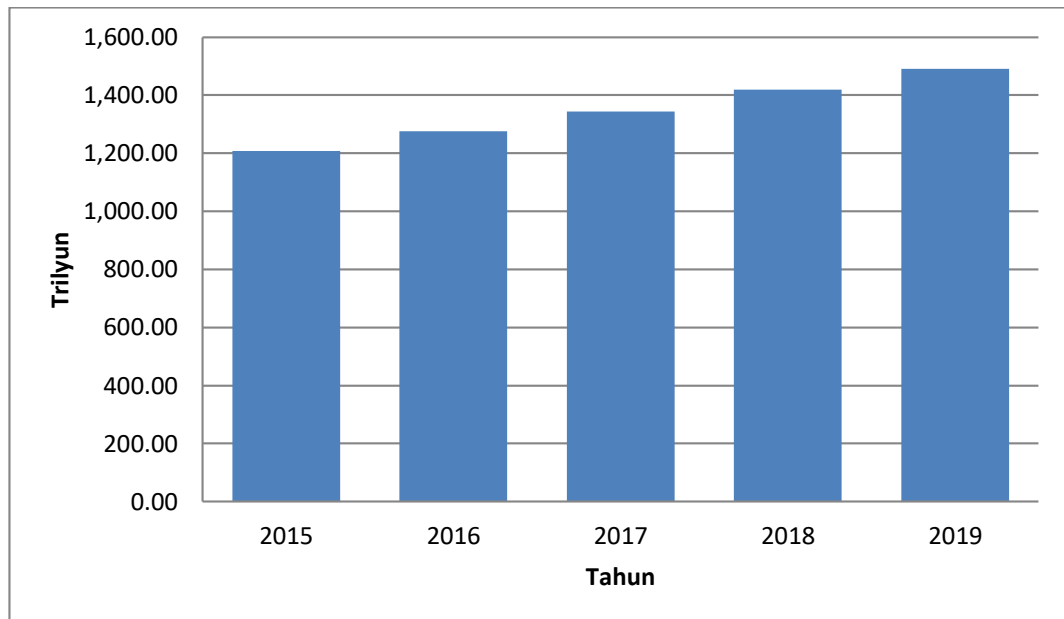
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2015-2019

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019. Angka IPM di Provinsi Jawa Barat melebihi angka IPM nasional. Angka terendah terjadi pada Tahun 2015 yaitu mencapai 72,41. Sedangkan angka tertinggi terjadi pada Tahun 2019 mencapai 72,85. Angka tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan IPM nasional yaitu mencapai 71,92. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik.

Selain IPM, yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode (Sasana Hadi, 2006).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

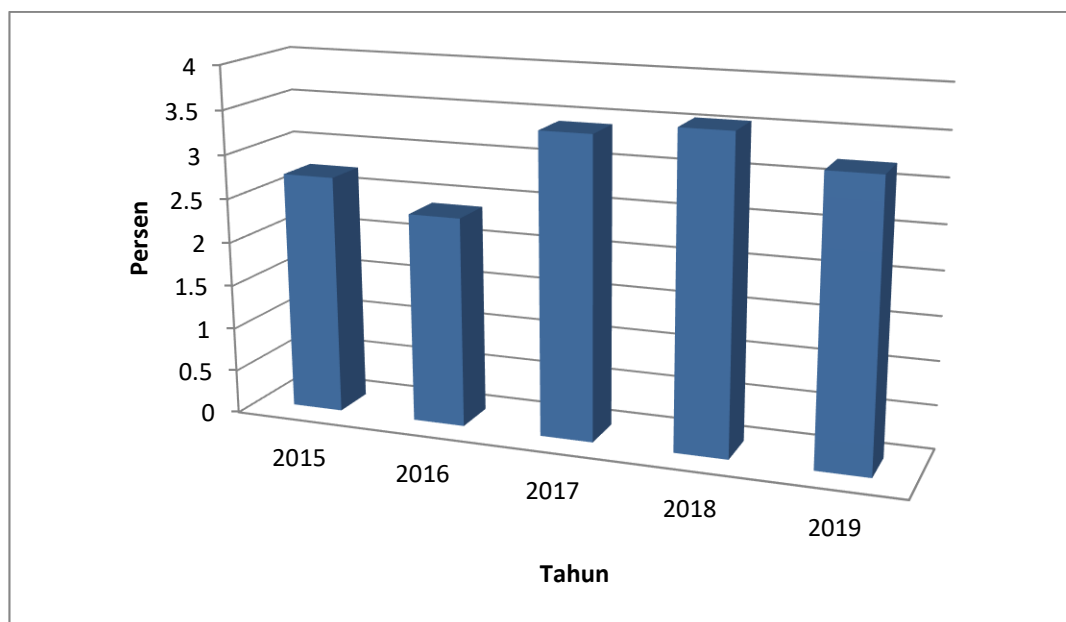
Gambar 1.3

PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa PDRB di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015, besarnya PDRB sebesar Rp 1.207.,34 Trilyun, pada tahun 2016 sebesar Rp 1.275.,21 Trilyun, pada tahun 2017 sebesar Rp 1.343.,43 Trilyun, pada tahun 2018 sebesar Rp 1.419.,12 Trilyun dan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.491.,36 Trilyun dan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 merupakan peningkatan paling tinggi yaitu sebesar 10,84%.

Dengan meningkatnya PDRB di Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut. Karena dengan meningkatnya pendapatan nasional melalui PDRB, kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi yang nantinya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Selain IPM dan PDRB, tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap tingkat pengangguran. apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 1.4

Inflasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Dari Gambar diatas, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 mencapai 2,73 persen. Pada tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 0,34 persen. Pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,16 persen. Dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 0,34 persen. Tingkat inflasi paling tinggi ditunjukkan pada

tahun 2018 sebesar 3,55 persen. Dan inflasi paling rendah ditunjukkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,39 persen.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka identifikasi yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan inflasi secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2005-2019?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan inflasi secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2005-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan inflasi secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2005-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan inflasi secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2005-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB dan inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.
2. Untuk pembaca, dapat digunakan sebagai pengetahuan dan referensi penelitian selanjutnya.
3. Untuk penulis, penelitian ini merupakan media untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu yang didapat selama kuliah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat dengan mengakses berbagai website yang diperlukan untuk mendapatkan data.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat diselesaikan sesuai dengan matriks yang direncanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengangguran

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Kelompok penduduk usia kerja terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja juga terbagi menjadi dua macam yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Definisi dari pekerja penuh adalah angkatan kerja yang sudah memenuhi syarat sebagai pekerja penuh yaitu jam kerja minimal 40 jam per minggu, dan bekerja sesuai dengan keahlian atau berdasarkan pendidikan.

Dan yang di maksud setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang masih sekolah dan ibu rumah tangga.

Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dilakukan oleh pihak perusahaan, sedangkan penawaran tenaga kerja dilakukan oleh pihak tenaga kerja.

Dalam pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menyebabkan masalah ketenagakerjaan yang berkepanjangan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi jika penawaran tenaga kerja lebih besar dibanding dengan permintaan tenaga kerja yang ada dalam pasar tenaga kerja. Sedikitnya jumlah permintaan tenaga kerja akan

mengakibatkan kelebihan pasokan tenaga kerja yang menawarkan diri untuk bekerja, akibatnya akan terjadi pengangguran.

Menurut Nanga (2005:249), pengertian pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya

Menurut *International Labour Organization (ILO)* pengangguran adalah ketika seseorang tidak bekerja tetapi secara aktif berusaha kembali masuk ke pasar tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Untuk mengukur pengangguran didalam suatu Negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran, yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja.

Adapun beberapa teori yang menjelaskan teori-teori pengangguran di Indonesia yaitu:

1. Teori Klasik

Pandangan dari Teori Klasik bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran. Pandangan Klasik juga berpandangan bahwa penganggura terjadi dikarenakan mis-alokasi sumber daya yang sifatnya sementara kemudian dapat diatasi melalui mekanisme pasar (Gilarso, 2004).

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya.

2. Teori Keynes

Teori Keynes berlawanan dengan Teori Klasik, karena Keynes berpendapat bahwa ketika tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan, karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Hal tersebut akan mengakibatkan produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya

bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

3. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus memberikan penjelasan bahwa semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan terciptanya angkatan kerja yang semakin banyak pula, dan hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia. Dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia sedikit maka angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi pengangguran. Dapat dikatakan bahwa teori Malthus dapat digunakan dalam menganalisis masalah pengangguran.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Jenis pengangguran dibedakan menjadi 2 bagian, yang pertama adalah jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya dan yang kedua adalah pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja.

a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Sebab Terjadinya

Pengangguran ini terbagi menjadi 4 jenis diantaranya adalah :

1. Pengangguran Siklikal

Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami penurunan maka daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya perusahaan akan

mengurangi produksi dan perusahaan terpaksa harus memberhentikan beberapa karyawannya.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran structural adalah jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

3. Pengangguran Friksional

Pengangguran ini bisa terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari sektor/pekerjaan yang satu ke sektor/pekerjaan yang lain. Misalnya, terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sector pertanian ke sektor industri atau keluar dari jenis pekerjaan yang satu tetapi belum mendapatkan pekerjaan baru.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi disebabkan akibat adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, maka perusahaan lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya.

b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Lama Waktu Kerja

Jenis pengangguran ini juga terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak ada kecocokan antara lowongan pekerjaan dan latar belakang pendidikan.

2. Setengah Menganggur

Pengangguran jenis ini ditujukan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7-8jam per hari sehingga penghasilannya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

4. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim, misalnya petani mereka akan bekerja selama musim panen setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya.

2.1.1.3 Faktor Penyebab Pengangguran

1. Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Lapangan Kerja Tidak Seimbang

Saat ini memang banyak sekali lulusan sarjana bahkan magister yang bisa dibilang berpengalaman dan memiliki pendidikan yang luas, namun karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat angka pengangguran semakin meningkat.

2. Kemajuan Teknologi

Saat ini sudah banyak perusahaan yang hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja karena sudah banyak perusahaan yang beralih dengan menggunakan tenaga mesin.

3. Rendahnya Pendidikan

Semakin tinggi gelar dan derajat seseorang, maka akan semakin mudah dalam mencari pekerjaan. Sedangkan rendahnya pendidikan akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan.

4. PHK

Biasanya, perusahaan melakukan PHK untuk menstabilkan system kerja. Pemutusan Hubungan Kerja bisa dibilang suatu hal yang paling ditakuti karyawan swasta, karena jika kontrak kerja habis atau adanya pengurangan karyawan maka akan terjadi peningkatan pengangguran.

2.1.1.4 Cara Mengatasi Pengangguran

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru
- b. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
- c. Menggalakkan pengembangan sector informal, seperti *home industry*.
- d. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.
- e. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru.
- f. Meningkatkan jumlah investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar pengangguran di suatu daerah berkurang

2.1.1.5 Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran

Secara umum penduduk merupakan setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama, sehingga jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu.

Banyaknya jumlah penduduk akan mempengaruhi adanya tingkat pengangguran karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan dan pada umumnya di negara berkembang laju pertumbuhan penduduk lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja.

Oleh karena itu tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menganggur. Penduduk terbagi menjadi dua bagian yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dari angkatan kerja yaitu jumlah penduduk masuk usia kerja dari yang berumur 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan dalam suatu periode tertentu.

Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan mereka yang kegiatannya hanya sekolah atau mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah dan golongan lain-lain seperti penerima pendapatan dan mereka yang hidupnya bergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, atau sakit kronis.

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Yang termasuk kategori jumlah yang menganggur yaitu jumlah penduduk yang berusia di antara 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan.

Sedangkan kategori yang termasuk pada jumlah angkatan kerja yaitu angkatan kerja yang menggunakan jam kerja dengan penuh ketika bekerja, dengan waktu sekitar 8-10 jam per hari. Angkatan kerja ini termasuk golongan bekerja karena mereka yang selama satu minggu

melakukan pekerjaan dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan dari keuntungan dan lamanya bekerja dihitung minimal 2 hari dan mereka yang selama satu minggu itu tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.2.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak on-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran Indeks Pembangunan Manusia pada awal dan akhir periode tersebut.

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia “*a process of enlarging peoples’s choices*”. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa focus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas.

Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya.

Sebagaimana laporan dari UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.

- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Konsep pembangunan manusia yang ditunjang oleh UNDP ini mengembangkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan pertama kali tahun 1990. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia.

Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir. Pengetahuan dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun keatas, dan hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang

menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu:

1. Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun variabel e_0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (Metode Brass, Varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses perhitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk endapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun keatas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah.

Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Indeks Standar Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *real perkapita GDP adjusted*. Untuk perhitungan IPM nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB perkapita karena hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM.

Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan

derngan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP):

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita pertahun untuk 27 komoditi dari SUSENAS Kor yang telah disesuaikan (=A).
- b. Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran A dengan IHK tahun yang bersangkutan.
- c. Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks “kemahalan” wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (PPP/Unit). Metode penghitungannya disesuaikan dengan metode yang dipakai *Internasional Comparsion Project* (ICP) dalam menstandarkan GNP perkapita suatu Negara.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.3.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). Produk Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan

dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran Produk Domestik Regional Bruto bervariasi tiap daerah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu: Pendekatan Produksi, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan dalam Sembilan sektor atau lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Air dan Gas, Bangunan, Perdagangan Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.

- b. Konsumsi Pemerintah.
 - c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
 - d. Perubahan stok.
 - e. Ekspor netto.
3. Menurut Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2000).

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada

peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten/kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral atau lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

2.1.4 Inflasi

2.1.4.1 Teori-Teori Inflasi

Menurut Iskandar Putong (2008) menjelaskan beberapa Teori Inflasi yaitu diantaranya Teori Kuantitas, teori Keynes dan Teori Strukturalis:

a) Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar baik uang kartal maupun uang giral. Tanpa adanya kenaikan jumlah uang yang beredar, apabila dalam hal yang sangat darurat, kenaikan harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Inti teori kuantitas tentang uang dan harga adalah bahwa tingkat harga barang adalah sepadan dalam pertimbangannya terhadap jumlah pasokan uang. Teori kuantitas itu dalam wujud rumusan yang paling sederhana dinyatakan sebagai berikut :

$$MV = PT$$

Dimana rumusan persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar dikalikan laju peredarannya (dalam jangka waktu tertentu) menunjukkan permintaan total (total demand) akan barang-barang. Teori kuantitas berdasarkan anggapan bahwa V keadaannya konstan atau setidaknya stabil dalam jangka waktu yang pendek. Begitu pula tentang T yang ditentukan oleh kapasitas produksi yang terpasang dalam suatu keadaan ekonomi tertentu.

b) Teori Keynes

Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan perekonomiannya. Proses inflasi dalam teori ini menyoroti bagaimana perebutan bagian rezeki antar golongan masyarakat yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa di sediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia.

c) Teori Strukturalis

Teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya ketegaran suplay bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab structural penambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi

inflasi yang relative berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industry barang ekspor tidak dibenahi.

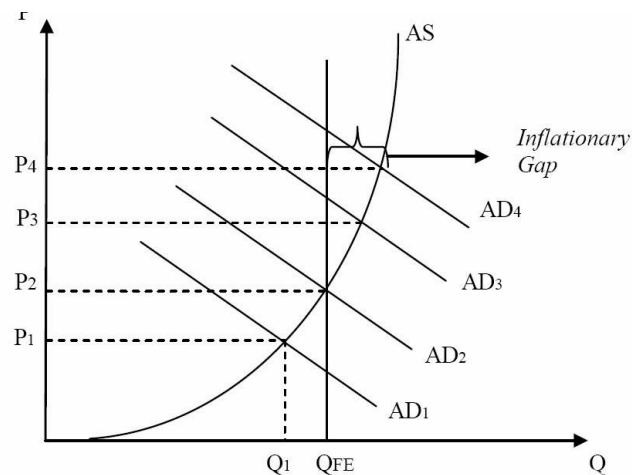
2.1.4.2 Jenis-Jenis Inflasi

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada dua bentuk yaitu:

1. Inflasi Tarikan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi ini akan menimbulkan inflasi. Gambar 1 dapat digunakan untuk menerangkan wujudnya inflasi tarikan. Kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD_1 , AD_2 , AD_3 , dan AD_4 adalah permintaan agregat. Misalkan pada mulanya permintaan agregat adalah AD_1 maka jumlah barang adalah Q_1 dan tingkat harga adalah P_1 . Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD_2 , akibatnya jumlah barang menjadi Q_{FE} dan tingkat harga naik dari P_1 ke P_2 , ini berarti inflasi telah wujud. Apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya maka permintaan agregat menjadi AD_3 . Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan jumlah barang meningkat dari Q_F menjadi Q_2 . Meningkatnya jumlah

barang yang diproduksi akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat yaitu dari P_2 ke P_3 .



Sumber: Boediono, *Ekonomi Makro*, 1995

Gambar 2.1 Demand Pull Inflation

2. Inflasi Dorongan Biaya (*Cost Push Inflation*)

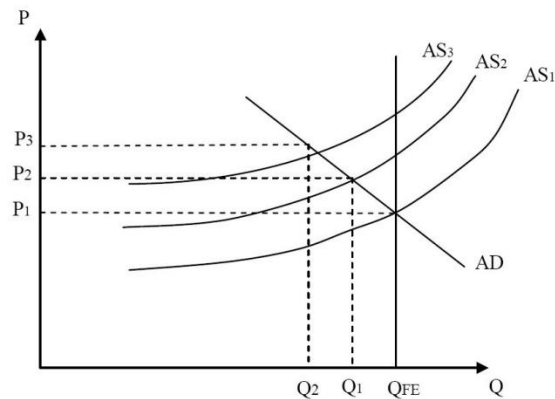
Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Cost Push Inflation dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 2. Kurva AS_1 , AS_2 , dan AS_3 adalah kurva penawaran agregat, sedangkan kurva AD adalah permintaan agregat, dan pada mulanya kurva penawaran agregat adalah AS_1 , dengan demikian pada mulanya

keseimbangan ekonomi negara tercapai pada jumlah barang yang diproduksi yaitu Q_{FE} , dan tingkat harga adalah pada P_1 .

Menaiknya jumlah barang yang diproduksi akan memindahkan fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS_1 menjadi AS_2 . Sebagai akibatnya tingkat harga naik dari P_1 menjadi P_2 . Harga barang yang tinggi ini mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah, maka biaya produksi akan semakin tinggi. Pada akhirnya ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS_2 menjadi AS_3 . Perpindahan ini menaikkan harga dari P_1 ke P_2 . Dalam proses kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan penawaran agregat ini mengakibatkan jumlah barang terus mengalami penurunan yaitu dari Q_{FE} menjadi Q_1 dan Q_2 . Berarti akibat dari kenaikan upah tersebut kegiatan ekonomi akan menurun dibawah tingkat kesempatan kerja penuh.

Dalam analisis diatas diandaikan kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti oleh kenaikan dalam permintaan riil. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan harga akan menjadi semakin cepat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan.



Sumber: Boediono, *Ekonomi Makro*, 1995

Gambar 2.2 Cost Push Inflation

2.1.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

a) Penawaran Uang (Jumlah Uang Beredar)

Para ekonom klasik cenderung untuk mengartikan uang beredar sebagai *currency*, karena uang inilah yang benar-benar merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan dan langsung mempengaruhi harga barang-barang.

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran uang akan menyebabkan inflasi. Jika penawaran uang terlalu banyak inflasi akan meningkat, dan sebaliknya jika penawaran uang terlalu sedikit terjadilah deflasi.

b) Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu (1 tahun). Indonesia menggunakan GDP untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonominya (pendapatan nasional).

GDP menunjukkan nilai seluruh output atau produk dalam perekonomian suatu negara. Dengan kata lain GDP dapat di definisikan sebagai nilai uang berdasarkan harga pasar dari semua barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian selama suatu periode tertentu.

c) Tingkat Suku Bunga SBI

Sertifikat Bank Indonesia adalah salah satu instrument yang digunakan untuk kebijakan open market operation dari Bank Sentral. Kebijakan open market operation (politik pasar terbuka) meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh Bank Sentral.

Kenaikan tingkat suku bunga SBI akan menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga surat berharga pasar uang (SBPU). Selain itu tingkat suku bunga bank umum juga mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan konsumen khususnya investor tidak tertarik untuk meminjam modal dari Bank Umum. Kondisi yang demikian ini menyebabkan bahan-bahan kebutuhan umum banyak yang diimpor sementara jumlah ekspor relative lebih kecil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB Dan Angkatan Kerja Terhadap

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2005-2019. Penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahuu

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Muhammad Shun Hajj dan Nugroho SBM (2013), <i>Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi Dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011.</i> Sumber: Jurnal Ekonomi. Universitas Diponegoro. Volume 2 Nomor 3.	Variabel independen: PDRB dan Inflasi Variabel dependen: Tingkat Pengangguran Terbuka	Variabel independen : -Upah Minimum Provinsi -Angka melek huruf .	PDRB tidak berpengaruh, Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, UMP positif dan angka melek huruf berpengaruh positif.
2.	Balqis Zahra Bahasoan (2019), <i>Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, Inflasi dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surakarta Tahun 2002-2017.</i> Sumber: Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Volume 5, No.4	Variabel independen: -IPM -Inflasi -PDRB Variabel dependen: Tingkat pengangguran	Variabel independen: Upah Minimum	Inflasi, upah minimum dan IPM tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan PDRB memiliki pengaruh signifikan.

3.	Dwi Makhroji dan Iin Nurkhasanah (2019), <i>Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten</i> . Sumber: Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Pandu Madania. Volume 9, No.1	Variabel independen: Indeks pembangunan manusia Variabel dependen: Tingkat pengangguran terbuka.	Variabel independen: Investasi dan tingkat upah.	Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan, investasi berpengaruh negatif dan signifikan, UMK berpengaruh negatif dan signifikan. Indeks pembangunan manusia, investasi dan UMK secara bersama-sama berpengaruh signifikan.
4.	Tengkoe Sarimuda RB dan Soekarnoto (2014), <i>Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011</i> . Sumber: Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Airlangga.	Variabel independen: PDRB Variabel dependen: Tingkat pengangguran terbuka.	Variabel independen: UMK, inflasi dan investasi	PDRB berpengaruh negative dan signifikan, UMK berpengaruh negative dan signifikan, Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan dan Investasi berpengaruh negative dan tidak signifikan.
5.	M Amirul Muminin dan Wahyu Hidayat R (2017), <i>pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap tingkat penganggura</i>	Variabel dependen: Tingkat pengangguran terbuka.	Variabel independen: Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan dan jumlah penduduk berpengaruh

	<i>terbuka di kabupaten/kota provinsi jawa timur tahun 2011-2015.</i> Sumber: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 1 Jilid 3.			positif dan signifikan.
6.	NP Sucitawati (2013), <i>Pengaruh Inflasi, Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Bali.</i> Sumber: Jurnal Ekonomi. Universitas Udayana.	Variabel independen: Inflasi Variabel dependen: Tingkat pengangguran.	variabel independen: investasi dan tingkat upah.	Secara simultan, inflasi, investasi dan tingkat upah berpengaruh signifikan. Secara parsial tidak berpengaruh signifikan
7.	Muhammad Nurholis (2014), <i>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014.</i> Sumber: Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 12, No.1.	Variabel independen: Indeks Pembangunan Manusia Variabel dependen: Tingkat Pengangguran.	Variabel independen: Pertumbuhan ekonomi dan Upah minimum.	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, upah minimum berpengaruh negatif dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif.
8.	Nur Fitri Yanti, Haerul Anam dan Harnida Wahyuni Adda (2017), <i>Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi</i>	Variabel independen: PDRB Variabel dependen: Tingkat Pengangguran	Variabel independen: Inflasi dan investasi.	Inflasi, investasi, dan PDRB secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan. Inflasi memberikan pengaruh negatif

	<i>Periode 2010-2014.</i> Sumber: Jurnal Katalogis. Universitas Tadaluko. Volume 5, No.4.			yang tidak signifikan. Investasi memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan dan PDRB memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan.
9.	Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo (2014), <i>Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran.</i> Sumber: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Volume 15, No.1.	Variabel dependen: Tingkat Pengangguran.	variabel independen: upah minimum	Upah minimum dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan,, PDRB berpengaruh negatif signifikan sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan .
10.	Radewa Rizki Mirna wijaya dan Devanto Shasta Pratomo (2013), <i>Pengaruh Upah Minimum, PDRB dan Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Studi Kasus Gerbangkertasial Tahun 2007-2012)</i> Sumber : Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Volume 2 Nomor 1.	Variabel independen: PDRB Variabel dependen: Tingkat pengangguran terbuka	Variabel independen: -Upah minimum -Populasi penduduk .	Upah minimum berpengaruh negative, PDRB berpengaruh positif dan populasi penduduk berpengaruh negatif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independent yaitu indeks pembangunan manusia, PDRB dan angkatan kerja pada Provinsi Jawa Barat dan variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Jawa Barat. Dari kerangka pemikiran tersebut, selanjutnya akan diketahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk memudahkan kegiatan penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintaan agregat rendah maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Dwi Makhroji dan Iin Nurkhasanah (2019) yang berjudul “Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat penganggura di Provinsi Banten” menggunakan alat analisis data

regresi panel dengan data sekunder. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

2.3.2 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran adalah GDP. GDP adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi didalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara (Sukirno, 1994).

Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya tingkat pengangguran di suatu negara (Mankiw, 2000:67).

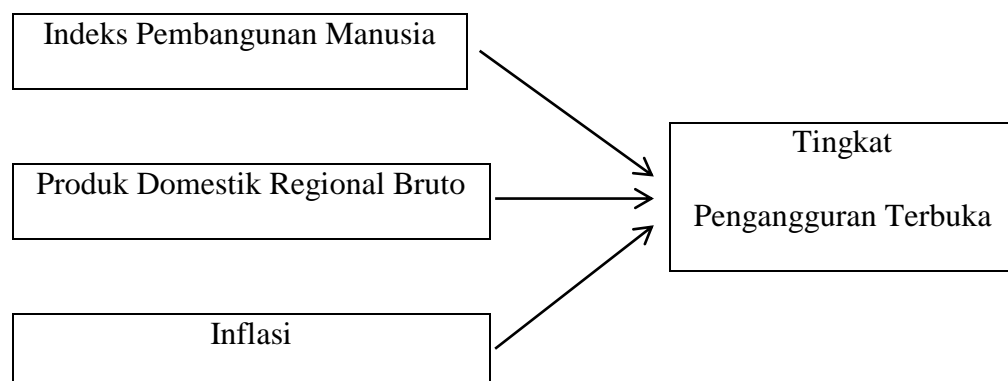
Sementara untuk suatu wilayah GDP tersebut dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode.

Pada hasil penelitian yang dilakukan Tengko Sarimuda RB dan Soekarnoto (2014) yang berjudul Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011 menggunakan alat analisis data regresi panel dengan data sekunder. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur.

2.3.3 Hubungan Inflasi Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negative terhadap jumlah pengangguran. apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2002).

Pada hasil penelitian yang dilakukan Tengko Sarimuda RB dan Soekarnoto (2014) yang berjudul Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011 menggunakan alat analisis data regresi panel dengan data sekunder. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2.3
Desain Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

Berdasarkan angka pemikiran diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto berpengaruh negatif sedangkan Inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objeknya adalah “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2005-2019” yang akan mengambil data dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) tentang jumlah tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, PDRB dan inflasi.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, PDRB dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan model regresi linier berganda. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software Eviews 9*. Metode deskriptif dalam penulisan digunakan untuk memberikan penjelasan tentang gambaran umum pengaruh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, metode deskriptif juga digunakan untuk menginterpretasi data.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah kegiatan menguraikan variabel-variabel agar dapat dijadikan indikator pada hal yang diamati dan dapat mempermudah dalam mengukur variabel yang dipilih dalam penelitian.

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Yaitu variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat dan akan memberikan hasil pada hal yang diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan inflasi.

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Yaitu variabel yang akan dipengaruhi oleh berbagai macam variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Satuan	Skala
1	Tingkat pengangguran terbuka (Y)	Presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Persen	Rasio
2	Indeks pembangunan manusia (X_1)	Indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia	Poin	Rasio
3	Produk domestik regional bruto (X_2)	Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam	Rupiah	Rasio

		jangka waktu tertentu		
4	Inflasi (X_3)	Proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus	Persen	Rasio

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam berbagai literasi seperti jurnal-jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3.2.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu (*time Series*) yang diperoleh berdasarkan informasi peneliti yang sudah disusun dan didapatkan dari hasil publikasi instansi tertentu. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2.2.2 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka yaitu dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, pengumpulan data juga berdasarkan hasil dokumentasi yaitu dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek studi penelitian.

3.3 Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan menggunakan variabel tingkat pengangguran terbuka (Y), indeks pembangunan manusia (X_1), produk domestik regional bruto (X_2), dan inflasi (X_3), maka penelitian ini akan menggunakan model:

Tingkat Pengangguran Terbuka = f (indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, inflasi)

Dari persamaan tersebut dispesifikasikan ke dalam model ekonometrika dalam bentuk model regresi berganda:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Tingkat Pengangguran Terbuka

X_1 = Indeks pembangunan manusia

X_2 = Produk domestik regional bruto

X_3 = Inflasi

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi indeks pembangunan manusia

β_2 = Koefisien regresi produk domestik regional bruto

β_3 = Koefisien regresi inflasi

Dari persamaan tersebut, karena pada penelitian ini satuan atau besaran variabel bebas yang digunakan ada perbedaan, menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dalam bentuk logaritma. Adapun persamaan linier berganda dalam bentuk logaritma adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Tingkat pengangguran terbuka

X₁ = Indeks pembangunan manusia

X₂ = Produk domestik regional bruto

X₃ = Inflasi

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi indeks pembangunan manusia

β_2 = Koefisien regresi produk domestik regional bruto

β_3 = Koefisien regresi inflasi

e = Variabel pengganggu (*error term*)

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis yang berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel (variabel dependen) pada satu atau lebih variabel (variabel independen). Model regresi yang terdiri dari lebih satu variabel independen disebut model regresi berganda. Pendekatan paling umum dalam menentukan garis paling cocok disebut sebagai metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). OLS digunakan untuk menghitung persamaan garis lurus yang meminimalisasi jumlah kuadrat jarak antara titik data X-Y dengan garis yang diukur ke arah vertikal Y. evaluasi model untuk mengetahui apakah model sudah baik atau belum dapat dilakukan dengan pengujian secara statistik. Indikator untuk melihat kenaikan model adalah R², F hitung, dan t hitung. Ukuran tersebut

digunakan untuk menunjukkan signifikan atau tidaknya model yang diperoleh secara keseluruhan.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2007), uji normalitas adalah sebagai alat uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.

Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam penelitian ini adalah uji normalitas atau sampel Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Uji ini digunakan untuk melihat apakah residual telah menyebar normal atau tidak. Uji normalitas dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat nilai probabilitasnya.

Hipotesis uji normalitas adalah:

$$H_0 = \text{Residual terdistribusi normal}$$

$$H_1 = \text{Residual tidak terdistribusi normal}$$

Residual akan terdistribusi normal apabila nilai probabilitas *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari taraf nyata yang digunakan ($p\text{-value} > \alpha$).

Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Probabilitas Jarque Bera (JB) $< 0,05$, maka residualnya berdistribusi tidak normal.

2. Jika nilai Probabilitas Jarque Bera (JB) $> 0,05$, maka residualnya berdistribusi normal.

3.4.2.2 Autokorelasi

Menurut Wijaya (2009), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t_{-1}). Autokorelasi terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Inertia, yaitu adanya momentum yang masuk ke dalam variabel-variabel bebas yang terus-menerus sehingga akan terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai variabel-variabel bebasnya.
2. Terjadinya penyimpangan spesifikasi karena adanya variabel-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model.
3. Bentuk fungsi yang salah.
4. Adanya *lags* (tenggang waktu)
5. Manipulasi data yang mengakibatkan data tidak akurat.

Apabila terdapat autokorelasi cara menanggulangi masalahnya yaitu dengan cara mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (*generalized difference equation*). Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1.

Uji Autokorelasi digunakan pengujian autokorelasi dapat juga dilakukan dengan uji *Lagrange-Multiplier (LM)*. Untuk mengetahui adanya hubungan antara

variabel atau tidak, salah satu pengujianya menggunakan metode *Breush Godfrey serial correlation LM test* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila *Prob. Chi-Square* $< 0,05$; artinya terjadi serial korelasi
2. Apabila *Prob. Chi-Square* $> 0,05$; artinya tidak terjadi autokorelasi.

3.4.2.3 Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005), uji multikolinearitas adalah sebagai alat uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance value* atau dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan *eviews*.

Menurut Sumodiningrat (2001), uji kolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen pada regresi yang ditentukan. Jika terjadi korelasi, maka dapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel, salah satu pengujianya menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 , maka artinya terdapat persoalan multikolinearitas diantara variabel bebas.
2. Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , maka artinya tidak terdapat persoalan multikolinearitas diantara variabel bebas.

3.4.2.4 Heteroskedastisitas

Menurut Winarno (2009), uji ini digunakan untuk melihat varians residual apakah konstan atau tidak. Apabila varians residual konstan maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan *Uji White*. *Uji White* menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen yang diregresikan terhadap variabel- variabel independennya.

Uji heteroskedastisitas hipotesisnya adalah:

H_0 = Homokedastisitas

H_1 = Heteroskedastisitas

Jika di temukan heteroskedastisitas, maka estimator OLS tidak akan efisien dan akan menyesatkan permalan atau kesimpulan selanjutnya. Ada beberapa yang bisa ditempuh untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas. (Winarno, 2009), yaitu, Uji White (*White Test*). Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan *White Test*, yaitu dengan meregresi residual kuadrat dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Ini dilakukan dengan membandingkan χ^2_{hitung} dan χ^2_{tabel} , apabila $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ maka hipotesis yang mengatakan bahwa terjadi heteroskedastisitas diterima, dan sebaliknya apabila $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ maka hipotesis yang mengatakan bahwa terjadi heteroskedastisitas ditolak. Dalam metode *White* selain menggunakan nilai χ_{hitung} , untuk memutuskan apakah data terkena heteroskedastisitas, dapat digunakan nilai probabilitas Chi Square yang

merupakan nilai probabilitas uji *White*. Jika probabilitas Chi Square $< \alpha$, berarti H_0 ditolak jika probabilitas Chi Square $> \alpha$, berarti H_0 diterima.

Untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel atau tidak salah satu pengujianya menggunakan metode Residuals- Fitted Test dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika *Prob. Chi-Square* $< 0,05$ artinya terjadi gejala heteroskedastisitas.
2. Jika *Prob. Chi-Square* $> 0,05$ artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

3.4.3 Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian (Gujarati, 2003):

3.4.3.1 Uji Statistik t

Uji statistik-t digunakan untuk menguji koefisien dugaan dari masing-masing variabel independen apakah secara terpisah berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Untuk menguji keberartian koefisien regresi digunakan uji-t yang kemudian dibandingkan dengan tabel. Statistik uji yang digunakan dalam uji-t :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{S_e(\beta_i)}$$

Di mana:

β_i = Koefisien regresi
 $S_e(\beta_i)$ = Standar Error

Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df) dan tingkat keyakinan tertentu.

Dengan hipotesis sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_{1,2} \geq 0$ artinya indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

$H_1 : \beta_{1,2} < 0$ artinya indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

2. $H_0 : \beta_3 \leq 0$ artinya Inflasi tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

$H_1 : \beta_3 > 0$ artinya Inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak, yang artinya secara individu variabel independent berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependent.

Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak, yang artinya secara individu variabel independen tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependent.

2. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 tidak ditolak, yang artinya secara individu variabel independent berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependent.

Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_1 ditolak, yang artinya secara individu variabel independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependent.

3.4.3.2 Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji koefisien dugaan secara serentak atau bersama-sama apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Statistika uji yang digunakan dalam uji-F:

$$F_{hitung} = \frac{e^2/(k-1)}{(1-e^2)/(n-k)}$$

Di mana:

e^2 = Koefisien determinasi

$1 - e^2$ = Jumlah kuadrat sisa

k = Jumlah variabel dependen dan independen

n = Jumlah sampel

Penilaian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada derajat kebebasan *degree of freedom* (d_f) dan tingkat keyakinan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 ditolak artinya seluruh variabel independent merupakan penjelas terhadap variabel dependen.

2. H_0 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_1 diterima artinya seluruh variabel independent bukan merupakan penjelas terhadap variabel dependent.

Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0: \beta \leq 0$ artinya Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

$H_1: \beta > 0$ Artinya Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat.

3.4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar proporsi sumbangan seluruh variabel independen terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Nilai R^2 dapat dianalisis dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum X_1 Y_t + \beta_2 \sum X_2 Y_t + \beta_3 \sum X_3 Y_t}{\sum Y_t}$$

Dimana:

R^2	= Koefisien determinasi
Y_t	= Tingkat Pengangguran Terbuka
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien regresi
X_1	= Indeks Pembangunan Manusia
X_2	= Produk Regional Bruto
X_3	= Inflasi

Dimana persamaan R^2 berkisar $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika mendekati 0 berarti kurang kuat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Jika nilai mendekati 1 maka ini menunjukkan semakin besarnya hubungan antara kedua variabel tersebut.